

Perubahan gunung kunci dari fungsi benteng pertahanan menjadi taman hutan raya, 1917-2023

Anwar Firdaus Mutawally^{1*}, Reiza D. Dienaputra¹

¹Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Sumedang, Indonesia
Email: anwar22005@mail.unpad.ac.id; reiza.dienaputra@unpad.ac.id

Informasi artikel: Naskah diterima: 13/06/2023; Revisi: 17/01/2024; Disetujui: 23/01/2024

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menelusuri perkembangan fungsi benteng gunung kunci di Kabupaten Sumedang. Selama ini dikenal masyarakat karena unsur mistis, sehingga belum banyak yang mengetahui sisi historis maupun upaya konservasi alam. Diperlukan kajian ilmiah yang membahas gunung kunci dari segi sejarah maupun konservasi alam. Fokus penelitian adalah perkembangan gunung kunci mulai benteng pertahanan pada masa kolonial hingga menjadi taman hutan raya pada masa kemerdekaan. Metode sejarah digunakan dalam penelitian ini dengan empat tahap yakni heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Penulis mendapatkan data sejarah dari perpustakaan, lembaga kearsipan, sumber daring, lokasi benteng dan koleksi pribadi. Sumber penelitian dari dokumen, buku, jurnal, laporan penelitian, prasasti dan sumber lisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gunung kunci bermula sebagai benteng pertahanan pada 1917. Hal ini dilakukan sebagai bentuk preventif pemerintah kolonial untuk menghindari serangan dari luar atau pemberontakan. Perubahan fungsi benteng dari infrastruktur pertahanan. Di mulai sejak tahun 1960-an dengan utilisasi gunung kunci sebagai kawasan hutan produksi pinus. Sejak tahun 1977 menjadi objek wisata yang dibuka bebas untuk pengunjung. Pada tahun 2004, beserta Gunung Palasari ditetapkan statusnya menjadi taman hutan raya di Indonesia.

Kata kunci: gunung kunci; benteng; taman hutan raya

Abstract: This research aims to trace the development of the function of the key mountain fortress in Sumedang Regency. So far, it has been known to the public because of the mystical element, so not many people know the historical side and nature conservation efforts. A scientific study is needed that discusses the key mountain in terms of history and nature conservation. The focus of the research is the development of the key mountain from a defense fort during the colonial period to a botanical forest park during independence. The historical method is used in this research with four stages, namely heuristics, criticism, interpretation and historiography. The author obtained historical data from libraries, archival institutions, online sources, fort locations and private collections. Research sources from documents, books, journals, research reports, inscriptions and oral sources. The results showed that the key mountain began as a defense fort in 1917. This was done as a preventive form of the colonial government to avoid attacks from outside or rebellion. Changes in the function of the fort from defense infrastructure. Started in the 1960s with the utilization of the key mountain as a pine production forest area. Since 1977 it has become a tourist attraction that is open to visitors. In 2004, along with Mount Palasari, it was designated as a botanical forest park in Indonesia.

Keywords: gunung kunci; fortress; grand forest park

Pendahuluan

Benteng merupakan infrastruktur yang erat kaitannya dengan pertahanan kota. Sesuai dengan tujuan pembangunannya, benteng berfungsi sebagai infrastruktur guna melindungi penduduk kota dari serangan musuh (Lepage, 2023). Selain berfungsi sebagai prasarana

pertahanan, benteng juga digunakan sebagai pusat operasi perusahaan dagang Eropa di Asia. Perusahaan dagang Eropa seperti VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie) dan EIC (East India Company) mendirikan benteng sebagai pangkalan untuk membuat jaringan dagang dan melakukan kolonisasi. Melalui benteng tersebut, para pedagang Eropa menggunakan kekuatan militer untuk menaklukkan musuh-musuh yang menghalangi tujuan ekonominya. Seiring berjalannya waktu, benteng berkembang menjadi pusat pemerintahan dan administrasi perusahaan dagang untuk mengatur wilayah kekuasaannya. Oleh sebab itu, benteng menjadi simbol dominasi kekuasaan, eksploitasi ekonomi, hingga kekuatan militer asing di daerah yang dikuasai penguasa pribumi (Marihandono, 2008).

Setelah bubarnya VOC pada tahun 1799, pemerintah Hindia Belanda melanjutkan jejak kompeni dengan menancapkan pengaruhnya di wilayah koloni menggunakan unsur psikis dan fisik. Unsur fisik merupakan yang paling mudah dikenali karena sisa peninggalannya masih terlihat hingga saat ini. Kekuasaan fisik kolonial terdiri dari tiga aspek yakni bangunan pemerintahan, bangunan pertahanan, dan bangunan religi. Bangunan pemerintahan dibangun untuk menunjang kekuasaan pemerintah kolonial, bangunan ini didirikan menggunakan arsitektur Eropa, dibuat megah, dan dilengkapi tembok pembatas. Dengan demikian, terjadi segregasi antara kaum yang berkuasa (Eropa) dengan kaum yang dikuasai (pribumi). Bangunan pertahanan didirikan untuk menunjukkan hegemoni militer kolonial terhadap penduduk koloninya. Misalnya Benteng Vredenburg yang dibangun lengkap dengan meriam menghadap Keraton Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kolonial memiliki keunggulan militer untuk menguasai masyarakat pribumi. Terakhir ialah bangunan religi yang bertujuan menunjukkan kekuasaan pemerintah kolonial atas kehidupan beragama penduduknya (Abrianto, 2020).

Benteng adalah salah satu unsur fisik warisan kolonial yang memiliki nilai historis tinggi, Benteng menjadi cagar budaya yang dilindungi guna memupuk jati diri bangsa dan kepentingan nasional. Dengan statusnya sebagai cagar budaya, benteng dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran sejarah masyarakat Indonesia (Budihardjo, 1997). Meskipun demikian, berdasarkan data Pusat Dokumentasi Arsitektur (PDA) pada tahun 2013, terhitung hanya lima persen dari 257 benteng warisan kolonial atau hanya 13 benteng yang berada dalam kondisi terawat. Mayoritas benteng berada dalam kondisi rusak atau hanya tersisa reruntuhan saja. Selain itu dari segi manajemen, pengelolaan situs benteng juga tidak dilakukan dengan baik sehingga kondisinya dibiarkan begitu saja. Faktor yang mendorong rendahnya pelestarian ialah rendahnya kesadaran sejarah akan nilai historis benteng-benteng tersebut. Berbeda halnya dengan di India, pemerintah dan masyarakat mampu bekerja sama untuk merestorasi atau menggunakan benteng menjadi fungsi lainnya. Dampaknya benteng peninggalan kolonial menjadi wisata sejarah yang menarik pengunjung dari dalam maupun luar negeri. Oleh sebab itu, situs benteng menjadi wisata sejarah yang memberikan keuntungan ekonomi dan meningkatkan kesadaran sejarah. Berdasarkan hal tersebut Indonesia juga seharusnya dapat memanfaatkan situs bersejarah tersebut dengan sebaik mungkin (Adrisijanti, 2013). Sumedang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Barat. Letak geografisnya

yang berada di pegunungan menjadikannya cocok dijadikan lokasi pembangunan benteng pada masa Hindia Belanda. Kabupaten Sumedang memiliki tiga benteng warisan kolonial Belanda yakni Benteng Gunung Palasari, Gunung Gadung, dan Gunung Kunci. Gunung Kunci menjadi perhatian karena lokasinya paling dekat dengan pusat kota dan aksesnya mudah dijangkau jalan raya. Dengan potensi tersebut, seharusnya situs ini menjadi potensi wisata sejarah yang menunjang perekonomian kabupaten maupun memberikan kesadaran sejarah bagi para pengunjungnya. Meskipun demikian, keberadaan Gunung Kunci hanya dikenal masyarakat karena unsur mistisnya saja, belum banyak yang mengetahui lebih dalam mengenai segi historis maupun upaya konservasi alam dari situs ini. Oleh sebab itu perlu kajian ilmiah yang membahas Gunung Kunci dari segi sejarah maupun konservasi alam.

Penelitian terdahulu mengenai perubahan fungsi benteng telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian pertama ialah artikel jurnal berjudul “Perubahan Peran dan Fungsi Benteng dalam Tata Ruang Kota” karya Djoko Marihandono pada tahun 2008. Artikel ini membahas perubahan fungsi beberapa benteng di Indonesia yakni Fort Vredenburg di Yogyakarta, Fort Rotterdam di Makassar, dan Fort Marlborough di Bengkulu. Dari ketiga benteng diketahui bahwa mulanya benteng digunakan untuk penegakan kepentingan politik, ekonomi, dan militer kolonial. Pasca kemerdekaan, benteng-benteng ini digunakan menjadi tempat wisata. Penelitian kedua ialah Skripsi berjudul “Perubahan Fungsi Benteng Palasari dan Kaitannya dengan Pembangunan Benteng Gunung Koentji di Kabupaten Sumedang” karya Dewi Sekar Kartini pada tahun 2016. Skripsi ini membahas tinjauan arkeologis perubahan fungsi benteng Gunung Palasari berubah dari prasarana pertahanan utama menjadi benteng penunjang setelah dibukanya benteng Gunung Kunci pada 1917. Meskipun demikian, pembahasan mengenai Gunung Kunci bukan menjadi poin utama pada penelitian tersebut. Penelitian ketiga ialah makalah berjudul “Gunung Kunci” karya Tejaningsih pada tahun 1996, makalah setebal 7 halaman ini menyajikan sangat sedikit informasi mengenai sejarah Gunung Kunci.

Kebaruan penelitian ini memperdalam pembahasan sejarah Gunung Kunci terutama perubahan fungsi benteng. Penelitian ini memiliki beberapa manfaat dan tujuan bagi kontribusi keilmuan. Manfaat pertama ialah dapat digunakan sebagai materi pembelajaran sejarah di sekolah dan perguruan tinggi, terutama sejarah lokal masa kolonial dan kemerdekaan. Manfaat kedua ialah untuk memajukan penelitian historiografi bertema konservasi alam yang masih jarang diteliti di Indonesia. Manfaat ketiga ialah sebagai bahan untuk mendiseminasi nilai historis Gunung Kunci pada masyarakat luas, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan minat pengunjung untuk mendatangi situs ini. Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini ialah untuk menjelaskan segi historis perkembangan Benteng Gunung Kunci dari benteng pertahanan menjadi Taman Hutan Raya. Dengan demikian, maka dari penelitian ini dapat memberikan implikasi terbaik fungsi benteng yang dapat digunakan untuk pemerintah.

Metode

Artikel jurnal ditulis menggunakan metode sejarah terdiri empat langkah yakni heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi (Sjamsuddin, 2012). Tujuan metode ini agar pembahasan

dapat dijelaskan secara diakronis (memiliki urutan kronologi peristiwa), tidak hanya sinkronis saja (meluas pada pembahasan tertentu). Pada tahap heuristik, dilakukan pencarian sumber yang relevan ke perpustakaan, lembaga kearsipan, sumber daring, lokasi benteng, dan koleksi pribadi. Sumber yang penulis gunakan terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer diperoleh dari buku *Ditiung Memeh Hujan* (1920) karya pangeran aria suria atmadja, prasasti peresmian wanawisata gunung kunci oleh supian iskandar (1977), dan peta vegetasi tanaman di taman hutan raya gunung palasari dan gunung kunci tahun 2017. Dari buku *Ditiung Memeh Hujan* penulis mendapatkan cerita yang menggambarkan reaksi pangeran aria suria atmadja pasca pembangunan gunung kunci. Dari prasasti peresmian penulis mendapatkan tanggal peresmian gunung kunci menjadi objek wisata, pihak yang terlibat dalam peresmian, dan pemborong yang bekerja saat pembangunan. Dari peta vegetasi penulis mendapatkan peta gunung kunci pasca diubah menjadi taman hutan raya dan jumlah tanaman yang ada disana pada tahun 2017. Sumber sekunder yang digunakan terdiri dari buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian. Selain menggunakan sumber tertulis, dilakukan juga wawancara dengan pengelola Taman Hutan Raya. Dari sumber lisan ini didapatkan beberapa kisah yang tidak terekam sumber tertulis misalnya penggunaan Gunung Kunci sebagai tempat pertunjukan musik dan adu domba pada tahun 1977-1993, penemuan besi besar di ruang senjata tahun 1997, hingga kematian puluhan satwa di Gunung Kunci pasca menjadi Taman Hutan Raya tahun 2004.

Tahap selanjutnya ialah kritik, pada tahap ini penulis melakukan dua langkah yakni kritik eksternal dan internal, kritik eksternal dilakukan dengan mengecek keadaan luar sumber seperti gaya bahasa, bahan baku sumber, hingga teks yang digunakan untuk menguji otentitas sumber. Contohnya buku *Ditiung Memeh Hujan*, buku ini memiliki tahun penerbitan tahun 1920, dari segi fisik sumber memiliki kondisi kertas yang menguning, Bahasa Sunda dengan ejaan lama, dan teks yang diketik menggunakan mesin tik seperti naskah sezaman lainnya. Berdasarkan hal tersebut sumber dinyatakan otentik karena tidak ada indikasi pemalsuan. Selanjutnya dilakukan kritik internal yakni dengan koraborasi untuk mengecek kredibilitas isi sumber sejarah (Herlina, 2020). Contohnya penulis membandingkan kisah yang diberikan narasumber mengenai peresmian gunung kunci menjadi objek wisata, Prasasti Peresmian (1977), dan laporan yang ditulis oleh Sutedja (1996). Hasilnya tidak ada sumber yang mengalami perubahan atau dipalsukan, dengan demikian maka sumber-sumber dinyatakan kredibel. Tahap ketiga ialah interpretasi, pada tahap ini penulis mengolah fakta yang telah disaring dari kritik untuk ditafsirkan. Rangkaian fakta yang telah diinterpretasi kemudian direkonstruksi menjadi penulisan sinkronik perubahan gunung kunci menjadi fungsi benteng pertahanan menjadi taman hutan raya, 1917-2023”.

Hasil dan Pembahasan

Latar sejarah

Latar belakang dibangunnya Benteng Gunung Kunci dapat diketahui dengan menelusuri perkembangan Bandung dan Sumedang pada abad ke-19 Masehi. Pada tahun 1808, Gubernur

Jenderal Daendels memulai pembangunan Jalan Raya Pos yang membentang dari Anyer hingga Panarukan. Dibangunnya Jalan Raya Pos bertujuan untuk memperkuat pertahanan pulau Jawa dari serangan pasukan Inggris yang sudah memblokir laut Jawa (Pratama, 2016). Pada saat itu, Bandung hanya sebuah pedesaan kecil yang jarang penduduk. Daendels melihat Bandung memiliki posisi strategis untuk pertahanan, hal ini karena Bandung memiliki pegunungan dan hutan yang cocok untuk kebutuhan pertahanan negara. Selain itu, ia juga menyadari bahwa Bandung memiliki potensi ekonomi yang baik sebagai kota pusat perekonomian (Hermawan, 2011). Karena itu ia memerintahkan Bupati Bandung, R. A. Wiranatakusumah II untuk memindahkan ibukota Kabupaten Bandung dari Krapyak (sekarang Dayeuhkolot) ke dekat Jalan Raya Pos. Perintah ini disampaikan Daendels melalui surat tertanggal 25 Mei 1810. Melalui penelusuran lahan dan perhitungan, akhirnya bupati Bandung menetapkan pusat kota baru di tepian barat Sungai Cikapundung (Pratama, 2016). Dalam kurun waktu puluhan tahun, Bandung mengalami perkembangan yang pesat baik dari segi sosial maupun ekonomi. Secara administratif Bandung mengalami perkembangan menjadi ibukota kabupaten, *gemeente* (kota), ibukota karesidenan Priangan, hingga menjadi calon ibukota Hindia Belanda baru.

Sejak peristiwa penyerbuan Batavia, Cirebon, dan Semarang oleh pasukan Inggris pada tahun 1811, pemerintah kolonial menyadari bahwa ibukota dan sebagian besar kota-kota besar Hindia Belanda berada di wilayah pesisir yang mudah direbut kekuatan asing (Hermawan, 2011). Oleh sebab itu, pemerintah Hindia Belanda mulai memikirkan untuk memindahkan ibukota Hindia Belanda serta pusat komando militer ke wilayah pedalaman pulau Jawa. Meskipun demikian usulan pemindahan ibukota dan pusat komando tidak berlangsung bersamaan melainkan dilakukan berangsur-angsur dimulai pusat komando militer terlebih dahulu (Kunto, 1986). Pusat komando militer dipindahkan secara bertahap ke wilayah Cimahi dan Bandung mulai tahun 1896. Upaya pemindahan dilakukan dengan mendirikan Garnizun Militer di Kota Cimahi pada tahun 1896, kemudian pabrik mesiu yang semula di Ngawi dan senjata api di Surabaya dipindahkan ke Bandung pada tahun 1898 (Kunto, 1986). Untuk memperhatikan logistik militer, pemerintah kolonial juga membangun rel kereta api beserta stasiunnya di Cimahi dan Rancaekek. Fasilitas kereta api ini berguna untuk mengangkut bahan-bahan pokok dan sarana angkutan personil militer.

Guna menunjang kebutuhan yang semakin meningkat, pemerintah Kolonial juga menetapkan Kabupaten Sumedang sebagai kota penyangga calon ibukota Hindia Belanda karena lokasinya yang bertetangga dengan Bandung (Hermawan, 2011). Oleh sebab itu, pemerintah kolonial membangun jalur rel kereta api dari Rancaekek ke Tanjungsari yang rencananya akan bersambung hingga pusat kota Sumedang. Sama seperti jalur kereta api yang dibangun sebelumnya, jalur kereta api Rancaekek-Tanjungsari bertujuan untuk mengangkut bahan pokok militer dan komoditas pangan dari Sumedang seperti kopi, teh, tembakau, dsb (Pratama, 2016). Pembangunan jalur rel kereta api dan fasilitas militer bertepatan dengan masa pemerintahan Pangeran Aria Suria Atmadja (1883-1919). Pangeran Aria Suria Atmadja diangkat menjadi bupati Sumedang pada tahun 1883 menggantikan ayahnya Pangeran Suria Kusumah Adinata (Pangeran Sugih) yang wafat pada tahun tersebut. Semasa menjabat menjadi bupati,

Pangeran Aria Suria Atmadja merupakan sosok yang sangat dikagumi masyarakat Sumedang karena kebijakan-kebijakannya yang menyejahterakan rakyat. Pada masa pemerintahannya terjadi perkembangan pada segi ekonomi dan sosial masyarakat Sumedang. Ia memerintahkan pembangunan Sekolah Pertanian dan memperkenalkan teknologi terasering pada pesawahan di Sumedang (Handayani et al., 2019). Karena kinerja yang baik, pemerintah Belanda menganugerahi Pangeran Aria Suria Atmadja beberapa penghargaan seperti *Groot Gouden Ster* (1891), *Officier der Orde van Oranje Nassau* (1903), bintang agung *Radder der Orde van Nederlandsche Leeuw* (1903) atau Bintang Leo, gelar Adipati Aria (1906), dan *Pangeran met de Vergulde Pajong* / Pangeran dengan payung gilap (1910) yang menunjukkan jasa-jasanya dalam memajukan Kabupaten Sumedang (Lasmiyati, 2014). Pada tahun 1914, pemerintah kolonial dihadapkan masalah pecahnya Perang Dunia I di Eropa. Saat tersebut pemerintah kolonial khawatir perang akan menyebar ke Hindia Belanda.

Selain itu kemenangan Jepang pada Perang Rusia Jepang Tahun 1905 menjadi bukti bahwa Jepang menjadi salah satu kekuatan besar di Benua Asia. Setelah kemenangan tersebut, Jepang dengan cepat menguasai banyak wilayah di Asia. Karena itu, pemerintah kolonial khawatir wilayah Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang, terlebih personil militer yang tersedia di Hindia Belanda jumlahnya terbatas sehingga mudah direbut kekuatan asing. Untuk mengatasi kekhawatiran tersebut, maka dilakukan beberapa upaya yakni pemindahan ibukota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung, memperkuat pertahanan Bandung, dan pembuatan satuan militer *Indie Weerbaar* (Ketahanan Hindia) (Nagazumi, 1989). Gagasan satuan militer pribumi sebenarnya telah ada sejak tahun 1907, namun gagasan ini baru jadi topik hangat pasca terjadinya Perang Dunia I. Artikel Surat kabar yang mengabarkan mengenai gagasan ini ada pada Java Bodein tahun 1914 berjudul *Indie Weerbaar* yang ditulis Staff Jenderal kolonial Belanda bernama Mayor Jenderal van der Weijden. Artikel ini mendapat sambutan dari berbagai organisasi pribumi di Hindia Belanda. Organisasi Budi Utomo menyambut baik gagasan ini begitu juga dengan Abdul Muis dari Sarekat Islam yang mendukung kehadiran *Indie Weerbaar*.

Meskipun demikian, mayoritas masyarakat Eropa dan Pribumi menolak gagasan ini karena tak memiliki tujuan jelas (Fachruruzi, 2020). Terinspirasi dari gagasan *Indie Weerbaar*, Pangeran Aria Suria Atmadja mengajukan satu program pada pemerintah kolonial yakni pelatihan militer pribumi Sumedang. Ia mengusulkan pada pemerintah kolonial agar merekrut para pemuda pribumi untuk dilatih bertempur menggunakan senjata. Baginya dengan memanfaatkan pemuda pribumi yang jumlahnya besar, maka rakyat Sumedang dapat sewaktu-waktu membantu pemerintah menjaga kedaulatan Hindia Belanda. Gagasan tersebut dituangkan dalam tulisan berjudul sama. Tulisan tersebut menjadi bukti bahwa Pangeran Aria memiliki kepentingan lain dengan *Indie Weerbaar* (Lubis, 2000). Rupanya pemerintah kolonial telah mengetahui tujuan Pangeran Aria, karena itu mereka menolak permintaannya. Bagi pihak kolonial, permintaan Pangeran Aria memiliki dua sisi. Pada satu sisi rakyat Pribumi yang jumlahnya besar dapat dilatih mempertahankan Hindia Belanda, namun disisi lain mereka menduga Pangeran Aria hendak merencanakan pemberontakan dengan melatih para pemuda menggunakan senjata (Lasmiyati, 2014). Untuk mencegah hal-hal buruk terjadi, pemerintah

kolonial secara diam-diam membangun benteng pertahanan di Sumedang. Pada tahun 1914, pemerintah kolonial mulai membangun tiga benteng pertahanan yang ada di Kabupaten Sumedang yakni Benteng Gunung Palasari, Gunung Kunci, dan Gunung Gadung (Lasmiyati, 2014). Meskipun demikian, menurut temuan Kartini (2016) Benteng Gunung Palasari sebenarnya telah ada sejak tahun 1906 sebagai gudang amunisi tentara Belanda. Oleh sebab itu, Benteng Gunung Palasari hanya direnovasi untuk menambah asrama tentara Belanda. Pembangunan benteng-benteng ini berlangsung selama tiga tahun dan selesai pada tahun 1917 (Lasmiyati, 2014). Bukit Panjunan dipilih pemerintah kolonial sebagai lokasi Benteng Gunung Kunci karena lokasinya yang dekat dengan Jalan Raya Pos dan keraton bupati Sumedang. Sebelum Benteng Gunung Kunci berdiri, mulanya Bukit Panjunan memiliki ketinggian dua pertiga dari tinggi Gunung Kunci saat ini yakni 350 mdpl dan ditumbuhi hutan jati lebat. Saat dilakukan pembangunan, pemerintah kolonial menebang hutan jati dan mengeruk puncak bukit Panjunan. Setelah puncak bukit dikeruk, kemudian dibangun benteng yang terbuat dari beton. Selain itu, warga kampung Panjunan juga diperintahkan mengeruk tanah yang ada di sekitar kampung. Tanah-tanah yang dikumpulkan ini kemudian digunakan untuk menimbun struktur bangunan benteng agar tertimbun tanah. Saking banyaknya tanah yang dipakai, lama kelamaan banyak cekungan tanah sisa penggalian yang menjadi danau yang disebut Situ Panjunan. Setelah benteng selesai ditimbun, tahap selanjutnya ialah penanaman pohon pinus (*pinus merkusii*) yang tujuannya agar benteng tertutupi vegetasi, menghindari erosi, dan memudahkan tentara Belanda untuk berkamufase (Tejaningsih, 1996).

Fase benteng pertahanan

Pada tahun 1917, Benteng Gunung Kunci mulai digunakan pemerintah kolonial untuk kepentingan militer (Lasmiyati, 2014). Terdapat empat pendapat yang menyebabkan benteng diberi nama Gunung Kunci. Pendapat pertama ialah karena pada pintu masuk menuju benteng terdapat logo dua kunci sehingga penduduk sekitar lebih mudah mengingatnya sebagai Gunung Kunci (Safitri et al., 2023). Pendapat kedua berpendapat bahwa Gunung Kunci secara filosofi bertujuan untuk melindungi Bandung, sehingga musuh harus menembus kunci pertahanan Belanda. Pendapat ketiga ialah karena sebelum dijadikan benteng pertahanan, wilayah bukit Panjunan banyak ditemui tanaman temu kunci (*Boesenbergia rotunda*) yang sedang bertunas. Dalam bahasa Sunda tunas temu kunci disebut sebagai *boros kunci*, dari kisah ini kemudian tercipta istilah Gunung Kunci. Sedangkan pendapat terakhir lebih menyoroti denah benteng yang menyerupai lubang kunci. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, penduduk sekitar menggunakan sebutan Gunung Kunci untuk menamai benteng tersebut (Tejaningsih, 1996). Benteng Gunung Kunci memiliki dua buah meriam besar, satu meriam diarahkan ke Bendungan Ragadiem dan satunya lagi diarahkan langsung ke Keraton Sumedang. Alasan meriam diarahkan ke Bendungan Ragadiem ialah untuk mengantisipasi munculnya serangan musuh dari arah utara Sumedang. Jika musuh berhasil memasuki kota dari arah utara, maka meriam akan menembak bendungan sehingga air yang meluap akan menghanyutkan pasukan musuh. Sedangkan alasan diarahkan meriam ke keraton ialah untuk mengantisipasi pemberontakan

yang dilakukan bupati Sumedang dan pengikutnya. Dengan mengarahkan meriam pada keraton, jika terjadi pemberontakan maka pasukan Belanda dapat menghancurkan pemimpinnya terlebih dahulu lalu dilanjut pengikut-pengikutnya dari benteng (Lasmiyati, 2014). Meskipun upaya berjaga di Sumedang tidak banyak membuahkan hasil. Hal ini karena Perang Dunia I berakhir pada tahun 1918 dan tidak pernah menyebar ke Hindia Belanda. Begitu juga dengan kecurigaan pemerintah kolonial akan pemberontakan bupati Sumedang juga tidak pernah terjadi. Pada tahun 1919, Pangeran Aria Suria Atmadja menyatakan pensiun dari jabatannya sebagai bupati Sumedang karena usia tua. Ia kemudian digantikan oleh adiknya yang bernama Raden Adipati Aria Kusumahdilaga (1919-1937) (Handayani et al., 2019). Dengan lengsernya kekuasaan Pangeran Aria, pemerintah Kolonial tidak banyak khawatir karena penerusnya tidak memiliki niatan untuk mengancam kedudukan pemerintah Hindia Belanda. Raden Adipati Aria Kusumahdilaga tidak memiliki keinginan untuk melakukan kegiatan yang membahayakan kekuasaannya dan lebih fokus pada kegiatan kesenian. Sebagai contoh Raden Adipati Aria merupakan tokoh pendirian Kursus Seni Tari Sunda pada 1 Februari 1924 (Panglipur, 2017).

Dibangunnya meriam Gunung Kunci dan hubungan yang memburuk dengan pemerintah Belanda menjadi alasan ditulisnya buku *Ditiung Memeh Hujan* karya Pangeran Aria Suria Atmadja. Dalam tulisannya ia menuliskan dongeng mengenai burung pendarang yang menjajah burung asli yang ada di hutan belantara. Raja burung asli kemudian memerintahkan burung-burung asli untuk berlatih pada raja burung pendarang, karena jika kekuatan mereka telah sama dengan raja burung pendarang, maka burung asli dapat memerangi burung pendarang yang menzalimi mereka. Dari isinya diketahui bahwa Pangeran Aria Suria Atmadja melakukan sindiran terhadap perlakuan buruk pemerintah Belanda pada rakyatnya, penolakan pemerintah kolonial untuk melatih rakyat Pribumi, lemahnya posisi pemerintah kolonial di Hindia Belanda, hingga pembangunan Benteng Gunung Kunci. Baginya pembangunan Benteng Gunung Kunci yang mengarahkan meriam pada keraton tidak merugikan dirinya sama sekali, melainkan menguntungkan rakyat Sumedang karena dengan banyaknya pembangunan yang dilakukan Belanda di Sumedang, ia yakin suatu saat bangunan-bangunan kokoh buatan Belanda itu akan jatuh pada rakyat Sumedang (Atmadja, 1920).

Naskah *Ditiung Memeh Hujan* telah ada sejak masa pembangunan Benteng Gunung Kunci, meskipun demikian baru bisa diterbitkan pada tahun 1920. Buku ini sempat dilarang beredar dan disita oleh pemerintah kolonial karena muatan “nasionalisme” yang membahayakan kekuasaannya. Pada bulan Maret 1942, tentara Jepang dengan cepat merebut banyak wilayah di Hindia Belanda. Setelah Belanda menyerah dengan perjanjian Kalijati tanggal 8 Maret 1942, Jepang otomatis mengambil alih fasilitas militer yang dimiliki Hindia Belanda termasuk Gunung Kunci. Oleh sebab itu, tentara Belanda dengan cepat mengamankan fasilitas-fasilitas senjata seperti artileri dan meriam agar tidak digunakan pasukan Jepang. Meskipun demikian, karena masih ada aktivitas tentara Belanda di benteng. Pasukan Jepang menggunakan pesawat untuk mengebom benteng dan mengepung benteng dari arah belakang. Akibatnya tentara yang ada didalamnya berhasil ditangkap dan salah satu bagian benteng mengalami kerusakan berat. Setelah benteng jatuh ke tangan Jepang, mereka tidak lagi menggunakannya untuk keperluan

militer karena nilai praktisnya yang berkurang pasca kerusakan. Untuk memenuhi kebutuhan perang, mereka menjarah pintu-pintu besi benteng untuk dilebur menjadi bahan baku senapan api (Tejaningsih, 1996).

Fase hutan produksi

Pasca kemerdekaan, tidak lagi difungsikan menjadi benteng pertahanan melainkan terbengkalai dan dibiarkan. Akibatnya Gunung Kunci pada masa awal kemerdekaan dipenuhi semak belukar dan pohon-pohon pinus tua. Begitu juga dengan pemakaman yang ada di sekitar benteng juga menyebabkan kesan mengerikan bagi penduduk yang masuk kesana. Karena tidak berada di bawah naungan lembaga apapun, Gunung Kunci sering menjadi sasaran pencurian. Pada tahun 1950-an, sering terjadi pencurian yang menyebabkan hilangnya beberapa struktur bangunan benteng misalnya tralis ventilasi. Beberapa oknum pencuri biasanya melakukan pencurian dengan dalih mencari kayu bakar di sekitar lokasi. Menurut penduduk sekitar, para pencuri biasanya tidak mengakui mereka melakukan pencurian melainkan hanya memulung sisa-sisa besi tua dari lokasi. Umumnya mereka mengambil benda kecil mulai selongsong peluru hingga yang besar seperti tralis. Melihat kondisi yang memperhatikan tersebut, pada awal tahun 1960-an, Perhutani mengalihfungsikan Benteng Gunung Kunci menjadi hutan produksi sebagaimana dua benteng lainnya di Kabupaten Sumedang yakni Gunung Palasari dan Gunung Gadung. Pada awal tahun 1960-an, pemerintah melakukan uji coba pengayaan pohon dengan dua jenis tanaman yakni pohon Mahoni Uganda (*Khaya antotecha*) dan Pinus (*Pinus merkusii*) di Gunung Palasari. Penanaman sukses mengubah Gunung Palasari menjadi hutan produksi. Melihat keberhasilan pengayaan di benteng lainnya, peremajaan pohon pinus dilakukan juga di Gunung Kunci pada tahun 1967. Pengayaan yang dilakukan di Gunung Kunci bukan bersifat peremajaan seperti yang dilakukan di Gunung Palasari melainkan hanya bersifat penambahan jumlah pohon saja (Susila & Apriliani, 2021).

Selama menjadi hutan produksi, warga sekitar Gunung Kunci dipekerjakan sebagai penyadap getah pinus untuk kebutuhan terpentin. Selain itu, warga sekitar juga dipekerjakan untuk membersihkan hutan produksi dari semak belukar. Meskipun demikian, Gunung Kunci tidak dapat digunakan sebagai tempat produksi kayu, hal ini karena jumlah kayu pinus yang terbatas serta kemiringan yang curam menyebabkan penebangan sulit dilakukan. Karena tak pernah terjadi penebangan pohon, warga sekitar menyangka gunung Kunci dialihfungsikan sebagai hutan lindung yang dilarang untuk ditebang. Karena peningkatan jumlah penduduk sekitar Gunung Kunci dan keperluan pemerintah daerah akan lapangan sepak bola. Wilayah pemakaman dan situ yang ada disekitar Gunung Kunci mulai dialihfungsikan. Wilayah pemakaman dan persawahan yang ada di sekitar benteng dialihfungsikan menjadi lapangan sepakbola Cigugur. Mayat-mayat yang ada di pemakaman dipindahkan ke TPU Batu Reog yang letaknya tidak begitu jauh dari makam atau dipindahkan ke makam pribadi (Imanuddin, 2016). Selain itu untuk mengganti persawahan yang dijadikan lapangan bola, pemerintah daerah mulai mengubur Situ Panjunan untuk digunakan sebagai sawah. Digusurnya pemakaman menghapus kesan mistis dan menjadi inspirasi penggunaan Gunung Kunci sebagai tempat wisata.

Fase tempat wisata

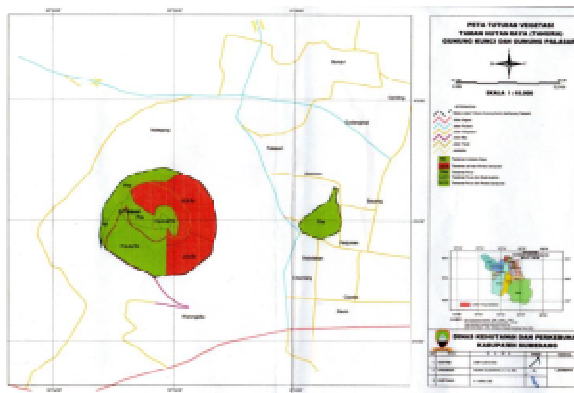
Pada awal tahun 1970-an, muncul inisiasi oleh bupati Sumedang saat tersebut yakni Drs. Supian Iskandar (1970-1977) untuk menjadikan Gunung Kunci sebagai salah satu obyek wisata. Hal ini lantaran lokasi Gunung Kunci yang dekat dengan jalan raya memiliki potensi besar untuk dijadikan tempat wisata, selain itu dengan dijadikannya Gunung Kunci sebagai obyek wisata diharapkan dapat meningkatkan perekonomian warga sekitar. Pembangunan dimulai pada pertengahan tahun 1970-an dengan melibatkan kontraktor CV. Soekapura dari Kabupaten Garut. Pembangunan dilakukan dengan menambahkan taman bermain dan kantor karcis yang berada di lereng bukit. Pada tanggal 22 April 1977, obyek wanawisata Gunung Kunci diresmikan dan dibuka untuk umum. Sejak saat itu, Gunung Kunci berada di bawah naungan dua lembaga pemerintah yakni Perhutani dan Dinas Pariwisata Kabupaten Sumedang. Pada masa pemerintahan Bupati sumedang Drs. Kustandi Abdurahman (1977-1983) dan Drs. Sutarja (1983-1993), obyek wanawisata digunakan sebagai tempat kompetisi adu domba se-kabupaten Sumedang. Biasanya kompetisi adu domba dilakukan setiap tanggal 22 April yakni bertepatan pada ulang tahun Kabupaten Sumedang. Para kontestan adu domba berasal dari seluruh kecamatan di Kabupaten Sumedang. Meskipun demikian, praktik ini lenyap setelah adu domba dilakukan di kecamatan masing-masing. Selain digunakan untuk adu domba, obyek wanawisata juga digunakan para seniman untuk mengadakan pertunjukan mulai band, pewayangan, hingga kelompok tari tradisional. Pada awal tahun 1990-an, terjadi desas-desus bahwa sumur yang berada di bunker Gunung Kunci berisi harta karun. Untuk mencegah terjadinya perusakan objek wisata, pada tahun 1997 pemerintah Kabupaten Sumedang dan para pengelola Gunung Kunci mengundang peneliti dari Badan Arkeologi untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut.

Oleh sebab itu dilakukan penggalian pada sumur yang kemudian ditemukan batang besi setinggi 1,8 meter. Setelah diteliti batang besi ini berfungsi sebagai dudukan artileri, yakni agar artileri dapat diputar oleh tentara. Keberadaan temuan-temuan baru arkeologis ini menjadi perhatian khusus oleh badan arkeologis, karena itu pada tahun 1999 Gunung Kunci kemudian dikelola juga oleh BPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya) yang kini bernama Balai Pelestarian Nilai Budaya. Untuk meningkatkan potensi wisata Gunung Kunci. Pada tahun 2002, pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan pertemuan dengan DPRD Kabupaten Sumedang guna membahas perubahan fungsi Gunung Kunci menjadi kawasan konservasi Taman Hutan Raya pada Kementrian Kehutanan Republik Indonesia. Setelah memperoleh kesepakatan dengan DPRD, Bupati Sumedang kemudian mengesahkan Surat Bupati Nomor 552/14/Hutbun Tanggal 3 Januari 2003 dan Surat Bupati Nomor 552/5100/Dishutbun Tanggal 14 Oktober 2003. Pada tahun 2004 menteri kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 297/Menhut-II/2004 tanggal 10 Agustus 2004 Tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Gunung Palasari dan Gunung Kunci. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa kedua gunung diresmikan statusnya menjadi Taman Hutan Raya dan luasnya telah ditentukan yakni Gunung Palasari seluas 25.81 Ha dan Gunung Kunci seluas 3.80 Ha. Pada tahun 2009 terjadi revisi luas taman hutan raya Gunung Palasari dan Gunung Kunci, Menteri Kehutanan kembali mengeluarkan SK.692/Menhut-II/2009 yang mengatur kembali luas Taman

Hutan Raya Gunung Palasari dan Gunung Kunci. Berdasarkan surat keputusan tersebut ditetapkan ulang bahwa luas Gunung Palasari diubah menjadi 31.22 Ha dan Gunung Palasari diubah menjadi 3.67 Ha.

Gambar 1

Peta tutupan vegetasi di taman hutan raya gunung kunci dan gunung palasari tahun 2017



Selain itu pada tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Sumedang mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Gunung Kunci dan Gunung Palasari. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa taman hutan raya tersebut dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Hutan Raya Gunung Palasari dan Gunung Kunci. Sejak tahun 2019, Tahura Gunung Kunci dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan Peta Tahun 2017, diketahui bahwa Taman Hutan Raya Gunung Kunci dan Gunung Palasari memiliki empat kluster vegetasi yakni Kluster 1 yang terletak di Gunung Kunci, dan Kluster 2, 3, dan 4 yang berlokasi di Gunung Palasari. Kluster 1 (Gunung Kunci) memiliki wilayah seluas 3,62 Ha yang kebanyakan ditanami pohon pinus. Mengenai data tanaman yang ditanam di Gunung Kunci terdapat pada tabel 1 di bawah ini. Diketahui sebagian besar pohon di Taman Hutan Raya Gunung Palasari dan Gunung Kunci ditanami pinus dan mahoni uganda. Selain itu terdapat pula tanaman-tanaman lainnya seperti angkana, mahoni, sengan budo, waru, nangka, damar, *Gmelina*, Randu, Bungur, Akasia Mangium, asam, beringin, sonokeling, dan gaharu juga ditanam disana meskipun jumlahnya tidak begitu banyak. Hal ini menunjukkan bahwa koleksi flora di Gunung Kunci sudah cukup lengkap. Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada upaya serius untuk mengembangkan koleksi fauna di Gunung Kunci. Meskipun ada beberapa satwa telah di uji coba untuk dilepaskan pada taman hutan raya Gunung Palasari dan Gunung Kunci, namun karena kurangnya perawatan satwa-satwa tersebut mati (Purnomo, 2015). Menurut para pengelola situs, hewan-hewan tersebut bukan hanya mati karena minim pengelolaan, melainkan juga mati karena tak tahan dengan cuaca dingin di Gunung Kunci. Mereka menyarankan agar pemerintah menyediakan hewan yang tahan dengan cuaca dingin. Usulan tersebut belum mendapat perhatian. Akibatnya hingga tahun 2023, belum ada satwa liar yang menjadi penghuni tetap taman hutan raya itu.

Tabel 1*Jumlah flora di tahura gunung palasari dan gunung kunci tahun 2017*

No.	Nama Pohon		Jumlah Tanaman
	Lokal	Latin	
1	Tusam Sumatra (Pinus)	<i>Pinus merkusii</i>	123
2	Mahoni Uganda	<i>Khaya anthotheca</i>	56
3	Angsana	<i>Pterocarpus adansonii</i>	8
4	Mahoni	<i>Swietenia macrophylla</i>	6
5	Sengon buto	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>	4
6	Waru	<i>Hibiscus tiliaceus</i>	3
7	Nangka	<i>Artocarpus heterophyllus</i>	3
8	Damar	<i>Agathis dammara</i>	2
9	Gmelina	<i>Gmelina arborea</i>	2
10	Randu	<i>Ceiba pentandra</i>	2
11	Bungur	<i>Lagerstroemia speciosa pers</i>	2
12	Akasia mangium	<i>Acacia mangium</i>	1
13	Asam	<i>Tamarindus indica</i>	1
14	Beringin	<i>Ficus benjamina</i>	1
15	Sonokeling	<i>Dalbergia latifolia</i>	1
16	Gaharu	<i>Aquilaria malaccensis</i>	1
Total Tanaman			216

Sejak menjadi taman hutan raya, Gunung Kunci dihadapkan pada beberapa permasalahan. Permasalahan pertama ialah menyempitnya wilayah taman hutan raya, revisi surat keputusan menteri pada tahun 2009 dilakukan karena terjadi pertumbuhan perumahan warga yang terus menggerus lahan taman hutan raya. Permasalahan kedua ialah sampah, meskipun telah dibuat peringatan berkali-kali, terdapat beberapa oknum di sekitar taman hutan raya yang membuang sampah di Gunung Kunci, hal ini menyebabkan kondisi taman hutan raya menjadi kotor. Permasalahan ketiga ialah kurangnya minat masyarakat untuk berkunjung pada taman hutan raya. Hal ini dikarenakan kurangnya fasilitas rekreasi untuk dijadikan tempat bermain (Paramastuti & Chofyan, 2013). Permasalahan keempat ialah misinformasi, beberapa oknum menyebarluaskan informasi palsu terutama hal-hal yang menyangkut mitos tanpa bersandar pada historis. Para pelaku menyebarkan video-video mitos yang berdampak pada penurunan minat pengunjung pada tempat wisata. Hingga tahun 2023, pemerintah daerah tengah berupaya menanggulangi masalah tersebut dengan melarang penyebaran rekaman Gunung Kunci tanpa seizin pemerintah daerah.

Kesimpulan

Gunung Kunci memiliki tiga fungsi yang berubah-ubah yakni sebagai benteng pertahanan, hutan produksi, dan taman hutan raya. Latar belakang berdirinya Gunung Kunci ialah kekhawatiran pemerintah kolonial akan jatuhnya Hindia Belanda pada Perang Dunia I dan pemberontakan yang akan dilancarkan Bupati Sumedang saat itu. Sejak tahun 1917 sampai 1942, Benteng ini sempat menjadi bangunan pertahanan Hindia Belanda yang strategis.

Meskipun demikian, pasca pendudukan Jepang benteng tak lagi digunakan sebagai tempat pertahanan karena tidak lagi efektif. Pasca kemerdekaan, Gunung Kunci mulai dialihfungsikan menjadi kawasan konservasi eksitu. Pada tahun 1967, Gunung Kunci digunakan sebagai hutan produksi setelah terbengkalai selama puluhan tahun. Pada masa ini terjadi perkembangan pesat yang mengubah kembali fungsinya menjadi objek wisata. Pada tahun 1977, Gunung Kunci mulai dijadikan sebagai objek wisata. Akhirnya pada tahun 2004, Gunung Kunci diresmikan menjadi salah satu dari taman hutan raya di Indonesia. Berdasarkan pembahasan tersebut, implikasi perubahan fungsi menunjukkan bahwa Gunung Kunci memiliki fungsi yang lebih baik pasca menjadi kawasan objek wisata konservasi alam, hal ini ditunjukkan dengan keberadaan tempat wisata yang menunjang konservasi alam disamping meningkatkan perekonomian warga sekitar. Saran untuk peneliti selanjutnya ialah melakukan penelitian perkembangan Gunung Palasari atau Gunung Gadung dari masa ke masa, baik dari segi historis maupun segi konservasi alam.

Daftar Pustaka

- Abrianto, O. (2020). Kekuasaan Masa Kolonial di Nusantara: Contoh Kasus Kota Sumedang. *Prosiding Seminar Arkeologi 2020*, 123–121.
- Adrisijanti, I. (2013). *Benteng dulu, kini, dan esok*. Kepel Press.
- Atmadja, A. S. (1920). *Ditiung Memeh Hujan*.
- Budihardjo, E. (1997). *Arsitektur Pembangunan dan Konservasi*. Djambatan.
- Fachrurozi, M. H. (2020). Indie Weerbaar Polemic and the Radicalization of Sarekat Islam (1917-1918). *IHiS (Indonesian Historical Studies)*, 4(2), 128–143.
- Handayani, R., Wiyanarti, E., & Yulifar, L. (2019). Rekam Jejak Pangeran Aria Soeria Atmadja (Bupati Sumedang Tahun 1883-1919). *FACTUM: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, 8(1), 85–96.
- Herlina, N. (2020). *Metode Sejarah*. Satya Historika.
- Hermawan, I. (2011). *Bandung Sebagai Ibukota Hindia Belanda*. Alqaprint.
- Imanuddin, A. M. (2016). Lapangan Cigugur. <https://sumedangtandang.com/direktori/detail/lapangan-cigugur.htm>
- Kartini, D. S. (2016). Perubahan Fungsi Benteng Palasari dan Kaitannya dengan Pembangunan Benteng Gunung Koentji di Kabupaten Sumedang. Universitas Gadjah Mada.
- Kunto, H. (1986). *Semerbak Bunga di Bandung Raya*. Granesia.
- Lasmiyati, L. (2014). Ditieng Memeh Hoedjan: Pemikiran Pangeran Aria Suria Atmadja dalam Memajukan Pemuda Pribumi di Sumedang (1800-1921). *Patanjala: Journal of Historical and Cultural Research*, 6(2), 223–238.
- Lepage, J.-D. (2023). *Dictionary of Fortifications: An illustrated glossary of castles, forts, and other defensive works from antiquity to the present day*. *Dictionary of Fortifications*, 1–368.
- Lubis, N. H. (2000). *Sejarah kota-kota lama di Jawa Barat*. Bandung: Alqaprint.

- Marihandono, D. (2008). Perubahan peran dan fungsi benteng dalam tata ruang kota. *Wacana*, 10(1), 144–160.
- Nagazumi, A. (1989). *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo, 1908-1918*. Grafitipers.
- Panglipur, K. J. (2017). *Peran Raden Ono Lesmana Kartadikusumah Dalam Perkembangan Tari Wayang Di Kabupaten Sumedang (1926-1987)*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Paramastuti, D., & Chofyan, I. (2013). Penataan zona taman hutan raya gunung kunci di kawasan perkotaan Sumedang. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 13(1).
- Pratama, F. (2016). Dwi Fungsi Kota Bandung Sebagai Pusat Pemerintahan Sipil dan Kemiliteran Hindia-Belanda Masa Depan (1808-1942). *Artikel Dalam Kegiatan Masa Pendidikan Karakter (MADIKA)*.
- Purnomo. (2015). *Praktik-praktik konservasi lingkungan secara tradisional di Jawa*. UB Press.
- Safitri, D., Surtikanti, R., Grataridarga, N., & Mardiaty, W. (2023). *Naskah Sumber Arsip Statis dengan Narasi Kreatif Tujuan Wisata*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Sjamsuddin, H. (2012). *Metodologi Sejarah*. Ombak.
- Susila, R., & Apriliani, R. N. (2021). Pendugaan Cadangan Karbon di Taman Hutan Raya Inten Dewata. *Wanamukti: Jurnal Penelitian Kehutanan*, 22(2), 94–103.
- Tejaningsih. (1996). *Gunung Kunci*.